

KUTIPAN PERNYATAAN POLITISI TERHADAP PROSES PEMBAHASAN RUU KUHAP- RUU KUHP

GOLKAR

"Saya perlu mengingatkan Komisi III DPR, wajib hukumnya mendengar suara rakyat yang mencurigai revisi KUHAP sebagai upaya melemahkan KPK. Jadi silakan proses revisi berjalan, tapi akomodasi juga aspirasi rakyat,"

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar di gedung Nusantara III, kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (7/2/2014).

<http://www.jpnn.com/read/2014/02/07/215356/Pimpinan-DPR:-Lanjutkan-Revisi-KUHAP->

PDIP

"Kami tak menginginkan selesai periode ini. Sikap fraksi tidak ada target untuk menyelesaikan pada periode ini, karena terlalu berat substansinya kalau dipaksakan,"

Trimedya Panjaitan, Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan usai menghadiri kajian Pemilu di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3).

<http://www.merdeka.com/politik/pdip-tidak-setuju-ruu-kuhpkuhap-diteruskan.html>

GERINDRA

"Saya sarankan itu supaya diberhentikan. Karena sekarang DPR sibuk untuk kampanye di dapil. Setelah dua bulan masuk sudah masuk pilpres. Setelah itu berakhir. Padahal UU ini sangat sprktakuler, tidak bisa main main,"

Martin Hutabarat, Ketua Fraksi Gerindra MPR saat di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2014).

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/25/gerindra-minta-pembahasan-kuhp-kuhap-dihentikan>

PPP

"Kita sikapi setiap fraksi. PPP ingin lanjutkan, tidak ada alasan kuat hentikan. Surat KPK sebagai masukan,"

Achmad Yani, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP dalam rapat di Gedung Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

<http://polhukam.rmol.co/read/2014/02/19/144473/Sepucuk-Surat-KPK-Membuat-Rapat-Komisi-III-dengan-Kemenkumham-Memanas->

HANURA

"Surat dari KPK tidak menghalangi kita untuk melanjutkan pembahasan undang-undang ini. Kalaupun nantinya pihak pemerintah mau menarik, itu persoalan lain"

Syarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hanura dalam rapat di Gedung Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

<http://www.radarlampung.co.id/read/berita-utama/66967-saatnya-sby-intervensi>

DEMOKRAT

"Surat Inikan juga tertuju kepada presiden maka yang menjawab presiden. Selama belum ada putusan dari presiden kita lanjutkan. Kenapa surat KPK ini sepertinya angker. Kenapa kita takut lanjutkan saja,"

Markus Silano, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat dalam rapat di Gedung Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

<http://polhukam.rmol.co/read/2014/02/19/144473/Sepucuk-Surat-KPK-Membuat-Rapat-Komisi-III-dengan-Kemenkumham-Memanas->

"pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP harus terus berjalan. Namun sayaratnya pembahasan itu harus melibatkan KPK dan pakar hukum progresif lainnya.

Marzuki Alie, Ketua DPR RI dari Fraksi Demokrat

<http://www.beritadewan.com/kpk-minta-revisi-kuhap-kuhp-stop-marzuki-alie-katakan-jalan-terus/>

PKB

"Kita dari DPR menyerahkan kesepakatan pada stekholder pemerintah dulu,"

Otong Abdurrahman, Politisi PKB di gedung senayan, Jakarta, (11/2/2014). (nusaonline.com)

<http://www.fpkb-dpr.or.id/read/11/02/2014/otong-abdurrahman-dengan-cara-apapun-kpk-harus-dikuatkan>

PKS

DPR akan tetap melanjutkan pembahasan perundangan tersebut. Bila dibatalkan, pembahasan akan dimulai dari nol lagi. Ia bersikeras, rancangan perundangan itu harus dibahas sebab aturan hukum di Indonesia selamatigala periode DPR masih menggunakan aturan waisan kolonial Belanda dan dianggap kuno.

Al Muzammil Yusuf, Wakil Ketua Komisi III DPR Ri dari PKS (24 Februari 2014)

<http://www.bijaks.net/news/article/7-27492/lantaran-kuno-pks-ngotot-lanjut-bahas-ruu-kuhp-kuhap>

PAN

"Selama pemerintah belum menarik RUU tersebut, DPR akan bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Khususnya kami dari Fraksi PAN terus meminta masukan dari berbagai pihak dalam pembahasan ini."

Taslim Chaniago dari PAN Anggota Komisi III DPR pada Jumat (28/2/2014)

<http://politik.teraspos.com/read/2014/02/28/81511/dpr-bantah-ruu-kuhap-disponsori-koruptor>

Indonesia Corruption Watch